

**LAPORAN  
RISET UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2012**



**TEMA :**

**PERUBAHAN IKLIM DAN KERAGAMAN HAYATI  
(CLIMATE CHANGE & BIODIVERSITY)**

**JEDA BALAK  
SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM FORMULASI  
PENGELOLAHAN HUTAN  
BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL  
(STUDI KASUS ALIH FUNGSI HUTAN DI KAWASAN  
JAWA TIMUR)**

Dra Sutinah, MS  
Drs. Tri Joko Sri Haryono, M.Si  
Sri Endah Kinasih, S.Sos, M.Si

Dibiayai oleh DIPA (RM) Universitas Airlangga TA, 2012 sesuai dengan Surat Keputusan  
Rektor Tentang Pelaksanaan Desentralisasi Program Penelitian Universitas Airlangga : Penelitian  
Unggulan Perguruan Tinggi (AUPT) Tahun 2012  
Nomor : 2613/H3/KR/2012, Tanggal 9 Maret 2012

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Oktober, 2012**

## RINGKASAN

**JEDA BALAK SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM FORMULASI PENGELOLAAN  
HUTAN BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL  
(STUDI KASUS ALIH FUNGSI HUTAN DI KAWASAN JAWA TIMUR)**

(Dra. Sutinah, MS, Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi, Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi,  
2012, 94 halaman)

Studi tentang alih fungsi hutan di Jawa khususnya di Jawa Timur, sejauh ini masih reaktif sedikit yang melakukan dan apalagi menawarkan pemahaman baru yang berkaitan dengan alih fungsi hutan. Salah satu masyarakat adat di Jawa Timur yang tinggal di Petung Ombo-Gunung Kelud Blitar di dalam kawasan hutan (*enclave*) memandang hutan sebagai sumber kehidupan terdapat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mereka melakukan pengelolaan hutan. Masyarakat adat tersebut untuk mengelola hutan itu ada nilai-nilai religio magis di yang dianutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, hutan di sekitar mereka tidak hanya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi TNI pun ikut mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis dengan alasan legal formal. Bahkan sejak beberapa tahun yang lalu TNI telah melakukan alih fungsi hutan dari tanaman keras ke tanaman hortikultura. Dengan demikian terdapat pluralisme hukum dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menemukan suatu model pengelolaan hutan yang disebut dengan *Jeda Balak*. *Jeda balak* merupakan suatu *social capital* untuk menghentikan pembalakan kayu untuk sementara waktu. *Jeda Balak* sebagai formulasi dalam pengelolaan hutan berbasis pada kearifan lokal. *Jeda Balak* menjadi katalisator dan strategi kebudayaan menciptakan lingkungannya (*ecological wisdom*) di masyarakat asli (*indigenous people*) dan menjaga sumber daya alam di kawasan hutan.

Penelitian ini mencoba untuk memahami adanya kepentingan dalam pengelolaan hutan. Di satu pihak, cara penyelesaian dengan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lokal, norma-norma yang berasal dari agama, atau bahkan kebiasaan yang sering ditafsirkan sebagai adat. Di pihak lain, cara konvensi politik dan melalui kebijakan negara yang dianggap berhasil. Oleh karena itu, *Jeda Balak* sebagai *cultural resolution* memiliki dimensi yang sangat kompleks dan masing-masing pilihan harus dikaitkan dengan situasi sosial dan sejarah yang khusus. Dalam kajian antropologi, situasi sosial itu seringkali hanya dibatasi pada konteks masyarakat lokal. Cara inilah yang diharapkan bisa mewujudkan bentuk model dan strategi kebudayaan dengan pendekatan budaya hukum (politik, hukum dan budaya) secara holistik di masyarakat masih kuat ketergantungan terhadap hutan.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bahan (input) masukan untuk merumuskan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan. Signifikan hasil penelitian ini selain bisa menjadi referensi agar setiap kebijakan efektif, efisien dan tepat sasaran, juga signifikan untuk menyusun model kebijakan komprehensif karena melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah agar dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah yang lebih konkrit dan proaktif untuk mengatasi persoalan alih fungsi hutan di Indonesia sehingga mampu membangun strategi yang dapat merekatkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam latarbelakang (budaya, etnik, suku, agama, aliran, golongan).

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan lokasi penelitian : ditentukan secara *purposive* di Petung Ombo Blitar, dengan pertimbangan karena konflik dalam

pengelolaan hutan yang sama-sama berkaitan militer, warga masyarakat adat setempat yang memiliki kebijakan/aturan dan kepentingan yang berbeda dengan TNI dalam pengelolaan hutan dan masyarakat adat yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan belum terselesaikan (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi *observation* ; dan (b) *indepth interview*. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (4) adalah Analisis Data. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema kemudian analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *jeda balak* tidak sekadar diartikan sebagai penghentian sementara pembalakan kayu, sehingga *jeda balak* menjadi tidak punya makna yang substansial, karena hutan bukan hanya tempat tumbuhnya kumpulan pohon kayu, tetapi merupakan ekosistem yang meliputi sumber daya alam tanah, air, sungai, danau, gunung, mineral, flora dan fauna, dan juga tempat hidup manusia, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu, *jeda balak* harus dimaknai sebagai komitmen bersama seluruh *stakeholders* (pemerintah, legislatif, pelaku usaha, LSM, masyarakat, perguruan tinggi, termasuk TNI AD) dengan penuh kesadaran untuk menghentikan (sementara) seluruh aktivitas tidak hanya pembalakan kayu, tetapi juga pengambilan hasil hutan nonkayu, penggarapan lahan untuk komoditi pertanian, pengambilan tumbuhan dan perburuan satwa (*bio-diversity*) secara legal maupun illegal. Selain itu, *jeda balak* sebagai suatu proses tidak berhenti sebatas *jeda balak* kayu, hasil hutan non-kayu, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup komitmen seluruh *stakeholders* untuk membangun *political will* dan *political action*. Selain itu, *jeda balak* juga memberi kesempatan kepada hutan (dengan segala isinya) untuk tumbuh dengan baik dan berkembang secara alami, sehingga dapat berfungsi dan memberi manfaat yang optimal bagi kesejahteraan hidup manusia.

Temua penelitian ini adalah bahwa alih fungsi hutan berdampak pada konflik agraria ini dan merupakan konflik struktural, yakni konflik yang timbul karena kebijakan pemerintah. Konflik ini terjadi, bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal besar, dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik agraria berawal dari proses "negaraisasi" tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Atas nama hak menguasai dari negara, pemerintah kemudian memberikan alas klaim atau hak pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha swasta atau pemerintah. Jadi, konflik agraria ini warisan dari kebijakan masa lalu, yang belum kunjung ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Alih fungsi hutan dapat dilakukan di mana salah satunya melalui *jeda balak*. *Jeda balak* pada dasarnya meliputi aspek proses dan target, dan karena itu secara substansial wacana *jeda balak* tidak semata-mata bermakna penghentian sementara pembalakan kayu hutan secara legal maupun illegal, tetapi juga *jeda* bagi pemungutan hasil hutan nonkayu, termasuk pengambilan flora dan fauna (keanekaragaman hayati) dari kawasan hutan.